

ANALISIS TENAGA PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MANADO

Syukurman Dearjoy Bago¹, Evi E. Masengi², Goinpeace Tumbel³

^{1,2,3} Universitas Negeri Manado

Email: dearjoy95@gmail.com¹

Abstract

This article examines the needs and roles of librarians at the Library and Archives Office of Manado City in supporting the quality of local library services. This study employs a qualitative approach using in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal a mismatch between the ideal and actual number of available librarians. Many librarians do not possess an educational background in library science and are required to perform multiple tasks, which negatively impacts service quality, limits service innovation, and reduces the effectiveness of literacy programs. Furthermore, the challenges include limited budgets, lack of training and regeneration, and recruitment policies that do not align with competency needs. This study suggests the need for strategic policies in librarian workforce planning, competency enhancement, and service evaluation systems aligned with national library standards.

Keywords: ibrarians, local libraries, information services, human resource management, literacy

Abstrak

Artikel ini menganalisis kebutuhan dan peran tenaga pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado dalam menunjang kualitas layanan perpustakaan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah ideal dan kondisi aktual pustakawan yang tersedia. Banyak pustakawan tidak memiliki latar belakang pendidikan kepustakawanan dan merangkap banyak fungsi, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan inovasi layanan, serta rendahnya efektivitas program literasi masyarakat. Selain itu, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan dan regenerasi, serta kebijakan pengangkatan pegawai yang belum mendukung kebutuhan kompetensi. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan strategis dalam perencanaan tenaga pustakawan, peningkatan kompetensi, serta sistem evaluasi layanan berbasis standar nasional perpustakaan.

Kata Kunci : Pustakawan, Perpustakaan Daerah, Layanan Informasi, Manajemen SDM, Literasi

PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan lembaga vital dalam pembangunan sumber daya manusia karena fungsinya sebagai pusat informasi, pendidikan, pelestarian budaya, serta rekreasi intelektual. Keberhasilan sebuah perpustakaan dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada keberadaan pustakawan sebagai pelaksana utama pelayanan. Tanpa pustakawan yang kompeten, berbagai fungsi strategis perpustakaan sulit diwujudkan secara optimal. Hal ini menjadikan pustakawan tidak sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai sumber daya profesional yang menentukan kualitas interaksi antara masyarakat dan institusi informasi (Dunne, 2019; Kine & Davidsone, 2022a; Samah et al., 2021).

Pentingnya tenaga pustakawan telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan perlunya pustakawan profesional sebagai syarat utama penyelenggaraan layanan perpustakaan yang efektif dan efisien. Namun, implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah, termasuk Kota Manado, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional. Salah satu tantangan mendasar adalah ketimpangan antara kebutuhan ideal tenaga pustakawan dengan kondisi riil di lapangan, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas layanan informasi publik, menghadapi keterbatasan dalam hal rekrutmen dan penempatan tenaga pustakawan. Berdasarkan data internal, jumlah pustakawan fungsional sangat minim dibandingkan kebutuhan layanan. Bahkan, sebagian besar tenaga yang mengisi jabatan fungsional merupakan hasil penyetaraan jabatan, bukan berasal dari latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas operasional dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada beban kerja pustakawan yang tidak proporsional. Satu pustakawan kerap merangkap berbagai tugas mulai dari pengolahan koleksi, layanan referensi, pendampingan kegiatan literasi, hingga kegiatan promosi budaya baca. Ketidakseimbangan ini menghambat inovasi layanan dan menurunkan kualitas interaksi pustakawan dengan pemustaka. Akibatnya, fungsi strategis perpustakaan sebagai agen literasi masyarakat kurang maksimal dalam pelaksanaannya (Atanda et al., 2021; Grossman et al., 2023; Masengi et al., 2023).

Selain aspek struktural dan teknis, tantangan pengelolaan tenaga pustakawan juga bersumber dari terbatasnya anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas pustakawan sering kali tidak menjadi prioritas dalam penganggaran tahunan. Hal ini berdampak pada minimnya kompetensi adaptif pustakawan terhadap teknologi informasi dan layanan digital, yang sebenarnya sangat dibutuhkan di era transformasi digital saat ini (La Macchia, 2021a; Peng, 2019; Tumbel et al., 2023).

Dalam konteks kebijakan kepegawaian, proses pengangkatan pegawai baru di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan fungsional kepustakawanan. Keterbatasan formasi ASN dan dominasi kebutuhan administratif membuat

jabatan pustakawan kerap kali tidak menjadi prioritas. Kondisi ini menciptakan stagnasi regenerasi tenaga pustakawan serta mempersempit ruang pembaruan kualitas SDM (Ali et al., 2025; La Macchia, 2021b).

Padahal, tantangan layanan perpustakaan daerah semakin kompleks. Masyarakat kini menuntut layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi. Pustakawan harus mampu bertransformasi menjadi fasilitator literasi digital dan pelatihan informasi, yang tidak hanya menyediakan koleksi fisik, tetapi juga mampu memandu pemustaka dalam memanfaatkan sumber daya informasi daring. Peran ini hanya dapat dijalankan oleh tenaga profesional yang dibekali dengan kompetensi khusus dan pengalaman praktik yang memadai (Balbin & Lascano, 2023; Soroya et al., 2024).

Melihat urgensi tersebut, maka penting dilakukan analisis mendalam mengenai kondisi aktual, tantangan, dan peran pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi aktual tenaga pustakawan, serta dampaknya terhadap layanan publik. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data.

Secara lebih luas, artikel ini juga ingin menegaskan bahwa pengelolaan pustakawan bukan sekadar isu teknis birokrasi, tetapi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia berbasis informasi. Perpustakaan yang kuat memerlukan pustakawan yang profesional. Oleh karena itu, perencanaan, pengembangan, dan penilaian pustakawan perlu diposisikan sebagai elemen strategis dalam kebijakan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kondisi aktual, tantangan, dan peran tenaga pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik dan kontekstual, serta memberikan ruang bagi interpretasi makna berdasarkan pengalaman subjek. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika sosial, struktur organisasi, serta persepsi pustakawan dan pemustaka secara langsung di lapangan (Ashiq & Warraich, 2023; Gordon, 2021; Son, 2024).

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado, yang merupakan lembaga teknis pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan informasi dan literasi publik. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: pertama, kondisi aktual tenaga pustakawan meliputi komposisi, latar belakang pendidikan, dan beban kerja; kedua, tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pustakawan termasuk kebijakan rekrutmen, anggaran, serta pelatihan; dan ketiga, peran pustakawan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, aktivitas literasi, dan promosi budaya baca.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, pustakawan, dan pemustaka. Panduan wawancara disusun secara terbuka untuk memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih luas. Observasi dilakukan untuk mencatat interaksi pustakawan dengan pemustaka serta kondisi layanan yang tersedia. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti laporan kepegawaian, program literasi, dan kebijakan internal dinas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk mempermudah interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan mengaitkan data lapangan terhadap teori manajemen sumber daya manusia dan standar kepustakawanan (Adetayo et al., 2023; Bahasoan et al., 2019; Begum & Habiba, 2023).

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan empat kriteria validitas dari Lincoln dan Guba, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Deskripsi konteks yang mendalam disajikan untuk meningkatkan *transferability*. *Dependability* dijaga dengan dokumentasi proses penelitian yang transparan, dan *confirmability* dicapai dengan menjaga objektivitas interpretasi peneliti terhadap temuan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan pustakawan di tingkat daerah (Kazemi Koohbanani et al., 2019; Lee, 2024; Sacchanand et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komposisi dan Jumlah Tenaga Pustakawan

Komposisi tenaga pustakawan merupakan aspek fundamental yang memengaruhi efektivitas layanan perpustakaan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah pustakawan ideal dengan ketersediaan riil. Idealnya, untuk memenuhi standar nasional, perpustakaan harus memiliki pustakawan yang cukup sesuai dengan jumlah koleksi, luas layanan, dan jumlah pemustaka.

Namun, data menunjukkan bahwa jumlah pustakawan yang diangkat secara fungsional masih sangat terbatas. Mayoritas tenaga diinstansi ini merupakan pegawai struktural atau pelaksana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kepustakawanan. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan, terutama dalam hal klasifikasi koleksi, layanan referensi, dan pembinaan pemustaka.

Ketimpangan jumlah tenaga juga terlihat dari pembagian kerja yang tidak proporsional. Sejumlah pustakawan harus menangani berbagai fungsi sekaligus, mulai dari pengolahan bahan pustaka hingga layanan promosi literasi. Minimnya personel menyebabkan terjadinya overload pekerjaan, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi dan akurasi kerja.

Kondisi tersebut diperparah dengan ketiadaan skema perencanaan tenaga pustakawan berbasis kebutuhan. Tidak terdapat perhitungan rasio pustakawan terhadap jumlah koleksi atau luas wilayah layanan. Akibatnya, rekrutmen tenaga cenderung dilakukan secara ad hoc dan tidak berbasis analisis kebutuhan.

Rendahnya jumlah tenaga pustakawan juga berdampak pada ketidaktercapaian indikator kinerja layanan. Beberapa program strategis perpustakaan tidak dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan personel yang memahami aspek teknis layanan perpustakaan. Hal ini tentu menghambat misi literasi daerah yang diemban oleh perpustakaan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera menyusun peta kebutuhan pustakawan secara komprehensif. Penataan komposisi tenaga harus menjadi prioritas dalam rangka mendukung terwujudnya perpustakaan sebagai pusat layanan informasi masyarakat yang profesional.

2. Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Pustakawan

Latar belakang pendidikan pustakawan menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan suatu perpustakaan dalam memberikan layanan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado tidak berasal dari latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Sebagian besar merupakan pegawai administrasi yang dialihkan atau diangkat melalui proses penyetaraan jabatan.

Akibatnya, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan koleksi, sistem klasifikasi, penggunaan OPAC, hingga teknik pelayanan pemustaka menjadi tidak optimal. Ketidakesesuaian ini bukan hanya berdampak pada keterbatasan layanan, tetapi juga pada akurasi pengolahan data koleksi dan efisiensi waktu kerja pustakawan.

Lebih jauh, rendahnya kompetensi juga menyebabkan kurangnya inovasi layanan. Pustakawan tidak cukup siap menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan kebutuhan pemustaka di era informasi. Keterbatasan pemahaman tentang teknologi informasi membuat pustakawan tidak dapat mengembangkan layanan berbasis digital, padahal kebutuhan tersebut semakin mendesak.

Masalah ini diperburuk oleh minimnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Tidak tersedia program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan terjadwal secara reguler. Padahal, dalam konteks pelayanan publik, pengembangan kompetensi merupakan elemen yang krusial untuk menjaga mutu dan daya saing institusi.

Sebagai konsekuensinya, peran pustakawan menjadi pasif dan administratif semata. Pustakawan lebih sering terlibat dalam pekerjaan rutin dibandingkan pengembangan layanan inovatif. Hal ini sangat merugikan mengingat perpustakaan seharusnya menjadi institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Solusi strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong pengangkatan pustakawan berdasarkan latar belakang pendidikan yang relevan, serta menyediakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pustakawan secara berkala. Upaya ini akan meningkatkan profesionalisme dan kemampuan adaptasi pustakawan dalam menjalankan peran strategisnya (Kine & Davidsons, 2022b; Lo et al., 2019).

3. Beban Kerja dan Tugas Berlapis Pustakawan

Beban kerja pustakawan yang tidak proporsional menjadi masalah laten di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado. Dengan jumlah tenaga yang minim dan kompetensi

yang tidak seragam, banyak pustakawan dihadapkan pada tugas berlapis yang melampaui kapasitas peran ideal mereka. Satu orang pustakawan dapat menangani tiga hingga lima jenis tugas yang berbeda dalam satu waktu.

Jenis tugas yang dirangkap meliputi pengolahan koleksi, layanan pemustaka, kegiatan promosi literasi, hingga pelaporan administrasi. Tumpang tindih tanggung jawab ini menyebabkan ketidakefisienan waktu kerja, penurunan kualitas layanan, serta kelelahan kerja yang tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan motivasi kerja pustakawan (Aregbesola et al., 2024; Salubi & Majavu, 2024).

Ketidakseimbangan beban kerja ini juga berdampak pada interaksi dengan pemustaka. Pustakawan yang terlalu sibuk dengan urusan administratif cenderung memiliki waktu terbatas untuk memberikan layanan yang bersifat edukatif atau konsultatif. Hal ini membuat pengalaman pemustaka menjadi kurang menyenangkan dan bersifat transaksional semata.

Lebih jauh, pustakawan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun program literasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan literasi yang dilakukan cenderung sporadis dan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Ketiadaan fokus dalam perencanaan program menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan peran sosial perpustakaan.

Di sisi lain, beban kerja berlebih juga meningkatkan risiko kesalahan kerja, khususnya dalam proses klasifikasi dan katalogisasi koleksi. Kesalahan ini berdampak langsung pada sistem informasi koleksi yang digunakan pemustaka dalam mencari referensi. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan perpustakaan.

Solusi jangka menengah dan panjang yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan analisis beban kerja sebagai dasar dalam pembagian tugas dan perencanaan penambahan SDM. Selain itu, pembentukan tim kerja khusus untuk setiap fungsi perpustakaan akan membantu distribusi tugas secara lebih proporsional.

4. Tantangan Pengangkatan Pustakawan dan Keterbatasan Anggaran

Salah satu faktor penyebab minimnya pustakawan profesional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado adalah kebijakan pengangkatan pegawai yang belum berpihak pada kebutuhan fungsional. Dalam beberapa tahun terakhir, formasi ASN untuk pustakawan sangat terbatas dan tidak diutamakan dalam kebijakan rekrutmen daerah (Kiszl & Winkler, 2022; Lopez et al., 2023).

Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya peran pustakawan dalam pembangunan literasi dan informasi publik. Pustakawan masih dianggap sebagai jabatan pelengkap dan bukan jabatan strategis. Persepsi ini menghambat upaya penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan.

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala serius dalam pengelolaan tenaga pustakawan. Tidak hanya berpengaruh pada rekrutmen, tetapi juga membatasi pelaksanaan pelatihan, seminar, dan workshop yang penting untuk pengembangan kompetensi pustakawan. Akibatnya, pengembangan SDM menjadi stagnan.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada terbatasnya insentif atau tunjangan kinerja pustakawan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya motivasi dan komitmen kerja, terutama bagi pustakawan yang sudah menjalankan tugas melampaui tanggung jawab formal. Padahal, penghargaan terhadap kerja profesional merupakan elemen penting dalam manajemen SDM (Ajani et al., 2024; Vassilakaki & Moniarou-Papaconstaninou, 2023).

Tidak adanya kebijakan khusus tentang pengembangan pustakawan dalam dokumen perencanaan strategis daerah juga menjadi kelemahan. Perpustakaan sering kali tidak dimasukkan dalam skala prioritas pembangunan daerah, sehingga penguatan pustakawan luput dari perhatian pembuat kebijakan.

Oleh karena itu, perlu ada intervensi kebijakan yang lebih afirmatif dari pemerintah daerah. Pengangkatan pustakawan melalui jalur khusus, penyusunan peta jalan pengembangan SDM perpustakaan, serta alokasi anggaran khusus untuk penguatan kapasitas pustakawan perlu menjadi bagian integral dari agenda reformasi pelayanan publik berbasis literasi.

5. Peran Strategis Pustakawan dalam Layanan dan Literasi

Pustakawan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk budaya literasi masyarakat. Di era informasi, pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat. Namun, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado, peran ini belum tergarap secara optimal (Lo & Stark, 2021; Saini, 2025; Serra & Revez, 2024).

Sebagian besar aktivitas pustakawan masih bersifat administratif dan teknis, seperti pelabelan koleksi, pendataan kunjungan, serta pengarsipan. Kegiatan literasi yang bersifat

edukatif dan transformatif belum terprogram dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara fungsi ideal dan praktik aktual pustakawan.

Minimnya interaksi aktif dengan pemustaka menyebabkan turunnya kualitas layanan perpustakaan sebagai ruang belajar. Pustakawan tidak secara aktif menginisiasi diskusi buku, pelatihan literasi digital, atau bimbingan informasi. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap literasi fungsional sangat tinggi, terutama di kalangan pelajar dan ibu rumah tangga.

Transformasi digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah juga belum direspons secara adaptif oleh pustakawan. Pelayanan berbasis aplikasi, pemanfaatan e-book, serta kurasi informasi daring belum menjadi bagian dari layanan reguler. Hal ini menyebabkan perpustakaan kalah bersaing dengan sumber informasi digital lainnya (Downie & Proulx, 2022; Wang & Si, 2024).

Masyarakat kini membutuhkan pustakawan yang mampu menjadi jembatan antara informasi dan kebutuhan praktis. Peran pustakawan sebagai "literacy navigator" sangat penting untuk membantu masyarakat memilah informasi, terutama di era maraknya hoaks dan disinformasi. Peran ini membutuhkan kompetensi komunikasi dan pedagogi yang kuat (Martzoukou, 2021; Seifi et al., 2020).

Untuk itu, perlu ada redefinisi peran pustakawan dari sekadar pengelola koleksi menjadi agen literasi. Redefinisi ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas, penyusunan program literasi yang terarah, serta pembentukan jejaring kolaborasi pustakawan dengan komunitas literasi, sekolah, dan instansi pemerintah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya program khusus yang dirancang secara sistematis dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik belum berjalan efektif, di mana alur permintaan informasi tidak tersosialisasi dengan baik dan respons terhadap permintaan sering melampaui batas waktu yang ditentukan.

3. Kompetensi sumber daya manusia belum berkembang secara maksimal meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, karena minimnya pelatihan, bimbingan teknis, serta tidak adanya sistem evaluasi yang terstruktur.
4. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi masih sangat terbatas, baik dalam bentuk infrastruktur teknologi maupun ruang layanan, serta belum adanya akses bagi penyandang disabilitas.

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan analisis tersebut, peneliti memberikan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu merancang dan menetapkan program prioritas terkait keterbukaan informasi publik, termasuk peningkatan sosialisasi yang lebih luas dan efektif melalui berbagai media dan pendekatan komunitas.
2. Penyusunan SOP yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin, guna memastikan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimtek secara berkala, serta menerapkan sistem evaluasi kinerja untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.
4. Penyediaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas, termasuk pengadaan perangkat teknologi, pembangunan ruang layanan informasi yang representatif, serta penyediaan aksesibilitas bagi kelompok difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetayo, A. J., Oketunji, I., & Hamzat, S. A. (2023). Mentoring support for librarians' research productivity in southwestern Nigeria: A study of quantity of publications in quality outlets and online channels. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(1), 102625. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102625>
- Ajani, Y. A., Oladokun, B. D., Enakrire, R. T., Ibironke, E. S., Morodi, L., Enidiok, M. S., Sulaiman, G. B., & Moshood, B. A. (2024). Metaverse adventures into libraries: what librarians and information users need to know. *Reference Services Review*, 52(3), 450–460. <https://doi.org/10.1108/RSR-05-2024-0025>
- Ali, M. A., Rafiq, M., & Arshad, A. (2025). Perceptions of academic librarians regarding their interpersonal competencies: A case of Pakistani universities. *Journal of Librarianship and Information Science*, 57(1), 71–89. <https://doi.org/10.1177/09610006231201409>

- Aregbesola, A., Owolabi, S. E., & Adebisi, T. (2024). Going to the Cities: The Strategic Roles of Public Libraries in Promoting Sustainable Development Goals. *Public Library Quarterly*, 43(3), 367–384. <https://doi.org/10.1080/01616846.2023.2253692>
- Ashiq, M., & Warraich, N. F. (2023). A systematized review on data librarianship literature: Current services, challenges, skills, and motivational factors. *Journal of Librarianship and Information Science*, 55(2), 414–433. <https://doi.org/10.1177/09610006221083675>
- Atanda, A. D., Owolabi, K. A., & Uguala, C. P. (2021). Professional competence and attitudes of library personnel towards digital services in selected university libraries in Nigeria. *Digital Library Perspectives*, 37(3), 209–222. <https://doi.org/10.1108/DLP-08-2020-0076>
- Bahasoan, A. N., Anwar, C., Khaldun, R. I., & Tahawa, T. H. B. (2019). The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012253. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012253>
- Balbin, D. J. S., & Lascano, E. A. (2023). Pandemic narratives of library and information centers in Baguio-Benguet. *Digital Library Perspectives*, 39(4), 571–603. <https://doi.org/10.1108/DLP-01-2023-0004>
- Begum, S. M., & Habiba, U. (2023). Are library professionals overcoming the COVID-19 pandemic challenges in the current reality? *Digital Library Perspectives*, 39(4), 420–443. <https://doi.org/10.1108/DLP-01-2023-0009>
- Downie, S., & Proulx, S. (2022). Investigating the role of gamification in public libraries' literacy-centered youth programming. *International Journal of Play*, 11(4), 382–404. <https://doi.org/10.1080/21594937.2022.2136637>
- Dunne, M. (2019). 8 The HRB national drugs library: breaking boundaries by bridging and bonding. *Poster Presentations*, 24, A46.1-A46. <https://doi.org/10.1136/bmjebm-2019-EBMLive.89>
- Gordon, I. D. (2021). Toughest job in the library. *Library Management*, 42(1/2), 46–55. <https://doi.org/10.1108/LM-04-2020-0072>
- Grossman, S., Cannuscio, C. C., Feuerstein-Simon, R., Winston, M., Agosto, D. E., Epstein, N. E., Martinez-Donate, A. P., & Klassen, A. C. (2023). Public Librarian Perceptions of Assisting Immigrant Patrons: Results from a Multi-State Survey. *Journal of Community Health*, 48(4), 659–669. <https://doi.org/10.1007/s10900-023-01204-w>
- Kazemi Koohbanani, H., Zarei, A., & Erfani, N. (2019). Measuring the librarians' quality of working life in the Iranian public libraries. *Library Management, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/LM-11-2018-0089>
- Kine, K., & Davidsons, A. (2022a). Latvian public libraries as a resource, cooperation partner and initiator for promoting media literacy and civic participation in local communities. *Journal of Librarianship and Information Science*, 54(4), 640–651. <https://doi.org/10.1177/09610006211036736>
- Kine, K., & Davidsons, A. (2022b). Latvian public libraries as a resource, cooperation partner and initiator for promoting media literacy and civic participation in local communities. *Journal of Librarianship and Information Science*, 54(4), 640–651. <https://doi.org/10.1177/09610006211036736>
- Kiszl, P., & Winkler, B. (2022). Libraries and financial literacy. *Reference Services Review*, 50(3/4), 356–376. <https://doi.org/10.1108/RSR-01-2022-0005>
- La Macchia, K. (2021a). An academic digital library advancing an equitable and inclusive educational environment. *Digital Library Perspectives*, 37(1), 18–27. <https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0062>

- La Macchia, K. (2021b). An academic digital library advancing an equitable and inclusive educational environment. *Digital Library Perspectives*, 37(1), 18–27. <https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0062>
- Lee, P.-C. (2024). Exploring organizational learning models in public libraries from an ESG perspective. *Journal of Librarianship and Information Science*. <https://doi.org/10.1177/09610006241299464>
- Lo, P., Ho, K. K. W., Allard, B., Horng, S.-C., & Liu, Y. (2019). Reading the city via the public central library in the sociocultural context: A comparative study between the Hong Kong Central Library, Shanghai Library and Taipei Public Library. *Journal of Librarianship and Information Science*, 51(2), 458–472. <https://doi.org/10.1177/0961000617742448>
- Lo, P., & Stark, A. (2021). Examining the relationship between social inclusion and mobile libraries in the age of Internet connectivity: A qualitative study of mobile librarians around the globe. *Journal of Librarianship and Information Science*, 53(2), 245–270. <https://doi.org/10.1177/0961000620935476>
- Lopez, M. E., Mehra, B., & Capse, M. (2023). An Exploratory Social Justice Framework to Develop Public Library Services with Underserved Families. *Public Library Quarterly*, 42(6), 576–601. <https://doi.org/10.1080/01616846.2023.2187180>
- Martzoukou, K. (2021). Academic libraries in COVID-19: a renewed mission for digital literacy. *Library Management*, 42(4/5), 266–276. <https://doi.org/10.1108/LM-09-2020-0131>
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E. M. C., & Supit, B. F. (2023). Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 40, 11–22. <https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8404>
- Peng, Y.-P. (2019). A Competency Model of Children's Librarians in Public Libraries. *The Library Quarterly*, 89(2), 99–115. <https://doi.org/10.1086/702194>
- Sacchanand, C., Wimolsittichai, N., Kankonsue, O., & Pattanakiatpong, W. (2024). The current state of academic librarians' continuing professional development and the roles of continuing professional development providers in Thailand. *IFLA Journal*, 50(2), 377–393. <https://doi.org/10.1177/03400352231223474>
- Saini, A. (2025). Climate Action Framework for Libraries: Empowering response to climate crisis. *IFLA Journal*, 51(2), 203–216. <https://doi.org/10.1177/03400352241302503>
- Salubi, O., & Majavu, U. (2024). Toward the development of a framework for literacy support and promotion by public libraries in financially and infrastructurally low-resourced territories. *Reference Services Review*, 52(2), 218–230. <https://doi.org/10.1108/RSR-06-2023-0056>
- Samah, N. A., Mohd Tahir, L., Wan Mamat, W. A. @ W. Y., Talib, R., & Abdul Latif, A. (2021). Malaysian research-support librarians' self-directed learning traits: Examining demographic differences and their relationship with competencies. *Journal of Librarianship and Information Science*, 53(4), 630–644. <https://doi.org/10.1177/0961000620967072>
- Seifi, L., Habibi, M., & Ayati, M. (2020). The effect of information literacy instruction on lifelong learning readiness. *IFLA Journal*, 46(3), 259–270. <https://doi.org/10.1177/0340035220931879>
- Serra, S., & Revez, J. (2024). Social inclusion of refugees and asylum seekers: The role of public libraries in the Lisbon Metropolitan Area. *Journal of Librarianship and Information Science*, 56(2), 397–414. <https://doi.org/10.1177/09610006221146549>
- Son, S. (2024). Libraries' roles in media and information literacy education: Obtaining the opinions of South Korean volunteer librarians through the Delphi method. *IFLA Journal*, 50(3), 525–

546. <https://doi.org/10.1177/03400352241252922>

Soroya, S. H., Sharif, A., & Faiola, A. (2024). Role of Pakistani e-libraries in promoting health awareness for the attainment of Sustainable Development Goal-3. *Health Information & Libraries Journal*. <https://doi.org/10.1111/hir.12554>

Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023). *Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency* (pp. 1985–1993). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_238

Vassilakaki, E., & Moniarou-Papaconstaninou, V. (2023). Librarians' support in improving health literacy: A systematic literature review. *Journal of Librarianship and Information Science*, 55(2), 500–514. <https://doi.org/10.1177/09610006221093794>

Wang, C., & Si, L. (2024). The Intersection of Public Policy and Public Access: Digital Inclusion, Digital Literacy Education, and Libraries. *Sustainability*, 16(5), 1878. <https://doi.org/10.3390/su16051878>